



LITERATURE REVIEW: ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19

Ryni Ramdhani Salim^a, Haliah^b, Nirwana^c

^a Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ramdhani.ryni@gmail.com, Universitas Hasanuddin Makassar

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis, haliah@fe.unhas.ac.id, Universitas Hasanuddin Makassar

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis, nirwana_ni@yahoo.com, Universitas Hasanuddin Makassar

ABSTRAK

This study aims to analyze the comparison performance of local governments in Indonesia before and during the COVID-19 pandemic. The method used in this study is a systematic literature review based on 10 research articles with the topic of assessing local government performance before and during the COVID-19 pandemic. From this research it is concluded that the majority of local government performance has decreased. This is due to restrictions on activities carried out during the Covid-19 pandemic.

Keywords: Covid-19, Financial Performance, Local Government

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *systematic literature review* berdasarkan 10 artikel penelitian dengan topik penilaian kinerja pemerintah daerah sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa mayoritas kinerja pemerintah daerah mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena pembatasan kegiatan yang dilakukan saat pandemi Covid-19.

Kata Kunci: Covid-19, Kinerja Keuangan, Pemerintah Daerah

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 menetapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dirancang menggunakan orientasi prestasi kerja yang ingin diraih. Dalam rangka mendorong keberhasilan kebijakan ini, diperlukan rancangan pendekatan kinerja menggunakan rasio kinerja keuangan daerah atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang sudah diputuskan dan disahkan [2].

Pandemi Covid-19 mempengaruhi keuangan indonesia, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menangani pandemi dengan menekankan laju persebaran Covid-19. Pendapatan pemerintah provinsi cenderung mengalami penurunan akibat adanya pandemi COVID-19, dan biaya atau pengeluaran pemerintah meningkat drastis selama pandemi COVID-19 berlangsung [5]. Penerimaan Pendapatan Daerah di Laporan realisasi APBN pada tahun 2020 terjadi penurunan menurut data yang didapatkan dari <https://djpk.kemenkeu.go.id/>, jika di bandingkan dengan tahun 2019 sebelum adanya pandemi Covid-19. Total penerimaan pendapatan daerah di Indonesia tahun 2020 sebesar 1.115.490,41 M jauh lebih sedikit dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1.198.407,26 M.

Artikel ini bertujuan untuk meninjau dan menganalisis penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan topik penelitian yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19. Menganalisis kinerja keuangan dapat diketahui dengan menggunakan rasio keuangan seperti rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian, dan rasio ekonomis [6].

Salah satu penelitian terdahulu ialah dengan melakukan penelitian tentang Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar yang memiliki hasil penelitian yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar mengalami penurunan di tahun 2020 (pandemi periode pertama) dari tahun sebelumnya yaitu 2019 (Sebelum pandemi), lalu mengalami peningkatan kinerja di tahun berikutnya yaitu 2021 dimana saat itu pandemi masih berlangsung. Dan juga memiliki hasil penelitian yang jika dilihat dari rasio efektifitas, rasio desentralisasi fiskal, dan rasio efisiensi, kinerja keuangan pemerintah kota Makassar sudah cukup baik tetapi dari rasio kemandirian Keuangan Daerah pemerintah kota Makassar dikategorikan rendah sekali dan Rasio keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Agency

Teori keagenan merupakan teori yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling di tahun 1976. Jensen dan Meckling menjelaskan jika hubungan *agency* terjadi ketika satu orang atau lebih (*principal*) memberikan pekerjaan atau wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan[5].

2.2. Keuangan Daerah

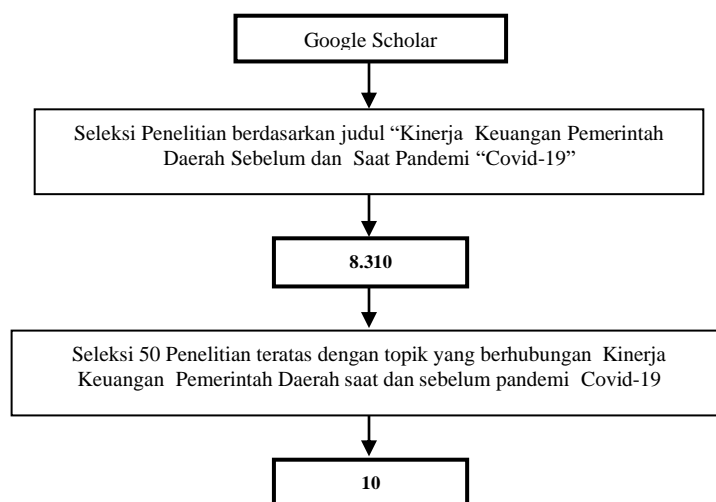
Laporan keuangan dirancang dengan tujuan untuk mengambil keputusan bagi pihak eksternal perusahaan dan juga yang akan melakukan pelaporan status dan hasil keuangan operasi perusahaan[11]. Keuangan daerah dapat merupakan hak dan kewajiban pemerintah daerah dengan penilaian berupa uang atau segala sesuatu berupa uang dan barang milik suatu daerah yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya [5].

2.3. Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja pemerintah daerah memiliki tujuan untuk perwujudan tanggungjawab publik, mengalokasikan sumber daya, memperbaiki kinerja, serta bentuk komunikasi kelembagaan. Dengan indikator yang dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu (1)biaya (ekonomi dan efisien) dan (2)kualitas pelayanan (efektivitas) [12].

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu *systematic literature review* atau tinjauan pustaka sistematis. Tahapan yang dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan metode SLR mengikuti tahapan penelitian yang dilakukan oleh Alvianto dkk (2022) yang terdiri atas identifikasi masalah, pencarian literatur, pemilihan hasil pencarian literatur dan analisa hasil pencarian literatur. Dapat diuraikan pada gambar berikut :



Gambar 1. Tahapan Pencarian dan Pemilihan Literatur

3.1. Identifikasi Masalah

Tahap identifikasi masalah, dapat dilakukan penentuan tujuan dan hasil yang akan dicapai penelitian yang menggunakan metode SLR. Tujuan penelitian ini yaitu mengkaji dan menganalisis kinerja. Perumusan dua pertanyaan penelitian/research question (RQ) yang berkaitan tujuan penelitian, yaitu:

RQ 1 : Rasio apa saja yang digunakan penelitian sebelumnya dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah?

RQ 2 : Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19?

3.2. Pencarian Literatur

Fokus penelitian, SLR dikhususkan pada Pemerintah Daerah di Indonesia, pencarian literatur dilakukan pada jurnal yang terindeks pada database portal Google Shoolar pada situs website

<https://scholar.google.com/>. Seleksi pencarian literatur berdasarkan judul yaitu “kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum dan saat pandemi Covid-19”. Hasil dari pencarian literature tersebut diperoleh sebanyak 8310 artikel yang merupakan penelitian dari tahun 2018 sampai dengan 2022.

3.3. Pemilihan Hasil Pencarian Literatur

Untuk memilah literatur dengan fokus penelitian pada pemerintah daerah, hasil pencarian literatur diperoleh 10 artikel.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut hasil analisis dari beberapa penelitian terdahulu yang membahas kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19 sebagai bahan dalam melakukan tinjauan pustaka dapat diuraikan pada tabel 1:

Tabel 1. Hasil Systematic Literature Review

Kode Jurnal	Penulis (Tahun)	Judul	Rasio	Hasil
P1.	Reza Cesar Tiarso (2021)	Analisis Laporan Keuangan Balai Desa Kemanggungan Dukuh Untuk Menilai Kinerja Keuangan Di Masa Pandemi Covid-19	1. Rasio Kemandirian Keuangan 2. Rasio Efisiensi 3. Rasio Efektivitas	1. Rasio kemandirian mengalami kenaikan 1%. 2. Rasio efisiensi mengalami penurunan drastis sebesar 84%. 3. Rasio efektivitas mengalami penurunan sebesar 3%.
P2.	Wulan Dri Puspita dan Dyah Ani Pangastuti (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemkot Batu Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19	1. Rasio Pertumbuhan 2. Rasio Kemandirian 3. Rasio Efektivitas 4. Rasio Efisiensi 5. Rasio Keserasian Belanja 6. Rasio Ekonomi	1. Pertumbuhan pendapatan mengalami penurunan. Sedangkan rasio pertumbuhan belanja mengalami penghematan. 2. Tingkat kemandirian masih didominasi oleh peran pemerintah pusat. 3. Tingkat efektivitas mengalami kenaikan . 4. Tingkat efisiensi berada dikategori efisien. 5. Tingkat keserasian belanja masih didominasi oleh belanja operasi, walaupun terjadi penurunan pada belanja modal. 6. Tingkat ekonomis dapat dikatakan ekonomis baik.
P3.	Septa Soraida (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin Sebelum Dan Selama Pandemi	1. Rasio Efektivitas 2. Rasio Kemandirian	1. Rasio efektifitas PAD cukup menurun yaitu sebesar 73,98% . 2. Rasio kemandirian menunjukkan berfluktuasi.
P4.	Kurnia Ahsanul Habibi, Sobrotul Imtikhanah, dan	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se- Provinsi Jawa Tengah Sebelum	1. Rasio Kemandirian Keuangan 2. Rasio Fleksibilitas Keuangan	1. Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 mengalami perbedaan senilai Asymp.sig 0,000. 2. Tingkat Fleksibilitas Keuangan Pemerintah Daerah sebelum dan saat

LITERATURE REVIEW: ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA ISEBELUM DAN SAAT PANDEMI ICOVID-19. (Ryni Ramdhani Salim)

	Rini Hidayah (2021)	dan SAAT Pandemi COVID-19	3. Rasio Solvabilitas Operasional 4. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek 5. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang 6. Rasio Solvabilitas Layanan	3. Rasio Solvabilitas Operasional 4. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek 5. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang 6. Rasio Solvabilitas Layanan	pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan. 3. Tingkat Solvabilitas Operasional Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 mengalami perbedaan senilai Asymp.sig 0,017. 4. Tingkat Solvabilitas Jangka Pendek Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed test senilai Asymp.sig 0,838. 5. Tingkat Solvabilitas Jangka Panjang Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed test senilai Asymp.sig 0,398. 6. Tingkat Solvabilitas Layanan Pemerintah Daerah sebelum dan saat pandemi Covid19 tidak mengalami perbedaan berdasarkan hasil uji Wilcoxon signed test senilai Asymp.sig 0,441
P5.	Muhamad Ichlasul Amal dan Puji Wibowo (2021)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid-19	1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Efisiensi 4. Rasio Aktivitas 5. Rasio Pertumbuhan 6. <i>Debt Service Coverage Ratio</i>	1. Tingkat kemandirian keuangan daerah, pada tahun 2019 sebesar 277%, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 188%. 2. Rasio Efektivitas PAD pada tahun 2019 sebesar 90%, sedangkan pada tahun 2020 terjadi kenaikan menjadi 98%. 3. Kinerja keuangan Pemerintah tahun anggaran 2019 sebesar 140%, sedangkan pada tahun anggaran 2020 mengalami penurunan menjadi 138%. 4. Rasio belanja operasi Pemerintah pada tahun anggaran 2019 – 2020 sebesar 81,98% dan 84,76%. Rasio belanja modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019 – 2020 sebesar 18,02% dan 6,14%. 5. Rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,49%, dan rasio pertumbuhan belanja operasi 11,93% 6. Pemerintah Daerah pada tahun 2019 dan 2020 sangat baik, dikarenakan rasio DSCR di atas 2,5.	
P6.	Bunga Qolbiyah Syahara dan Muhamad Aufa	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-	1. Rasio Kemandirian Keuangan 2. Rasio Fleksibilitas Keuangan 3. Rasio	1. Terdapat perbedaan tingkat kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19. 2. Terdapat perbedaan tingkat fleksibilitas keuangan Pemerintah Daerah Jawa Timur sebelum dan saat	

(2022)	19		Solvabilitas Operasional	pandemi Covid-19.
			4. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	3. Terdapat perbedaan tingkat solvabilitas operasional Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.
			5. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	4. Tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas jangka pendek Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.
			6. Rasio Solvabilitas Layanan	5. Tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas jangka panjang Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.
				6. Tidak terdapat perbedaan tingkat solvabilitas layanan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebelum dan saat pandemi Covid-19.
P7.	Arwini Musdalifah (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar Di Masa Pandemi Covid-19	1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Efektivitas 3. Rasio Desentralisasi 4. Rasio Efisiensi 5. Rasio Kekeragaman	1. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar selama sebelum dan saat pandemi Covid-19 (tahun 2019-2021) jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada kategori Rendah sekali. 2. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori cukup efektif. 3. Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Makassar dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal berada pada kategori Cukup. 4. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori efisien. 5. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Makassar jika dilihat dari Rasio keserasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang.
P8.	Fitri Rahmawati dan Endang Kiswara	Dampak Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi Di Indonesia)	1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2. Rasio kemandirian keuangan daerah 3. Rasio Efektivitas PAD 4. Rasio Kontribusi Pajak Daerah	Bersumber pada kajian uji Paired Sample Test diperoleh kesimpulan terjadi perbedaan signifikan sebelum dan selama Covid-19 mengenai kinerja keuangan daerah pada rasio efektivitas PAD, rasio kontribusi pajak daerah pada PAD, dan rasio belanja modal. Sedangkan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, dan rasio kontribusi retribusi daerah pada PAD disimpulkan tidak terjadi perbedaan signifikan mengenai kinerja

LITERATURE REVIEW: ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA ISEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19. (Ryni Ramdhani Salim)

			Terhadap PAD	keuangan daerah pemerintah provinsi sebelum dan selama Covid-19 .
			5. Rasio Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap PAD	
			6. Rasio Belanja Modal	
P9.	Anjelia Onibala, Tri Oldy Rotinsulu, dan Ita Pingkan F. Rorong (2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara	1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 3. Rasio Efektivitas PAD 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 5. Rasio Keresasian	1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal berada pada kategori Sangat Kurang. 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah berada pada kategori Rendah sekali. 3. Rasio Efektivitas PAD berada pada kategori efektif. 4. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berada pada kategori tidak efisien. 5. Rasio Keresasian dapat menunjukkan bahwa belanja operasi dan belanja modal belum seimbang. 6. Kinerja keuangan Kabupaten Minahasa Tenggara di masa pandemi Covid-19 dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya tidak mengalami penurunan yang berarti.
P10.	Demvi Vebiani, Nugraha, dan Rd Dian Hardiana (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)	1. Rasio Kemandirian 2. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal 3. Rasio Efektivitas PAD 4. Rasio Efisiensi Keuangan	1. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. 2. Tingkat derajat desentralisasi fiskal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 tidak mengalami perbedaan yang signifikan. 3. Tingkat efektivitas keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan. 4. Tingkat efisiensi keuangan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat sebelum dan pada saat pandemi COVID-19 mengalami perbedaan yang signifikan.

Sumber: Data Diolah (2022)

Dari 10 jurnal yang telah terpilih, dapat diklasifikasikan frekuensi penggunaan rasio untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19, yang dapat diuraikan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Frekuensi Penggunaan Rasio Penilaian Kinerja Keuangan

Rasio	Kode Artikel	Jumlah
Kemandirian	(P1), (P2), (P3), (P4), (P5), (P6),	10

	(P7), (P8), (P9), (P10)	
Efektivitas	(P1), (P2), (P3), (P5), (P7), (P8), (P9), (P10)	8
Efisiensi	(P1), (P2), (P5), (P7), (P9), (P10)	6
Desentralisasi	(P7), (P8), (P9), (P10)	4
Keserasian	(P2), (P7), (P9)	3
Pertumbuhan	(P2), (P5)	2
Fleksibilitas	(P4), (P6)	2
Solvabilitas Operasional	(P4), (P6)	2
Solvabilitas Jangka Pendek	(P4), (P6)	2
Solvabilitas Jangka Panjang	(P4), (P6)	2
Solvabilitas Layanan	(P4), (P6)	2
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	(P5)	1
Ekonomi	(P2)	1
Kontribusi Pajak Daerah	(P8)	1
Kontribusi Retribusi	(P8)	1
Belanja Modal	(P8)	1

Sumber: Data Diolah (2022)

Tabel 1 dan 2 menjawab dari RQ1 terkait rasio yang digunakan pemerintah daerah di Indonesia untuk menilai kinerja keuangan yaitu Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Desentralisasi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Fleksibilitas, Rasio Solvabilitas Jangka Pendek, Rasio Solvabilitas Jangka Panjang, Rasio Solvabilitas Layanan, *Debt Service Coverage Ratio*, Rasio Ekonomi, Rasio Kontribusi Pajak Daerah, Rasio Kontribusi Retribusi, dan Rasio Belanja Modal. Rasio yang paling umum digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dari analisis beberapa penelitian di atas yaitu rasio kemandirian. Untuk menjawab pertanyaan RQ2, penelitian ini membandingkan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia antara sebelum dan saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan tiga rasio yang paling sering digunakan dalam penelitian yang telah dianalisis sebelumnya. Tiga rasio tersebut yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi.

Perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19 dengan menggunakan rasio kemandirian, mayoritas artikel penelitian yang dianalisis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Salah satu alasan penyebab turunnya kinerja yaitu adanya penyesuaian anggaran dan mengubah APBD, dimana dijelaskan pada artikel P5 posisi PAD pada masa pandemi mengalami kontraksi menyebabkan kegiatan ekonomi terhambat karena terbatas jumlah kegiatan yang boleh dilakukan dan mengakibatkan pendapatan menjadi tidak optimal. Tetapi ada pula di beberapa artikel yang menggunakan rasio kemandirian menyimpulkan bahwa kinerja keuangan mengalami peningkatan, alasan diungkapkan pada artikel P1 bahwa pada masa pandemi mengalami peningkatan 1% dibandingkan tahun sebelumnya yang disebabkan pada saat itu pemerintah daerah fokus meningkatkan pajak daerah untuk membangun ruko-ruko yang menyebabkan pendapatan asli daerah juga meningkat.

Perbandingan dengan menggunakan rasio efektivitas untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19, mayoritas artikel yang dianalisis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah pada tahun 2020 dapat dikatakan lebih efektif dibandingkan tahun sebelumnya. Salah satu alasan dikatakan efektif dapat dilihat dari artikel P2 yang menjelaskan peningkatan tersebut terjadi karena adanya penyesuaian pada anggaran PAD tahun 2020 akibat adanya

pembatasan kegiatan sosial dan lebih ke penanganan pandemi Covid-19, dengan presentase dari cukup efektif di tahun 2019 menjadi lebih efektif di tahun 2020. Tetapi ada pula kinerja keuangannya menurun atau tidak efektif pada tahun 2020, contohnya yaitu pada artikel P1 dengan penurunan sebesar 3% karena pada saat itu retribusi pajak menurun yang disebabkan pandemi Covid-19.

Rasio terakhir untuk menilai perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia sebelum dan saat pandemi Covid-19 yaitu rasio efisiensi. Pada tahun 2020 kinerja keuangan menjadi tidak efisien dibandingkan tahun sebelumnya menurut mayoritas artikel yang dianalisis, alasan terjadi penurunan kinerja keuangannya diungkapkan oleh artikel P5 yang menjelaskan mobilisasi penerimaan pemerintah daerah agar lebih maksimal harus mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi ada pula kinerja keuangan pada tahun 2020 lebih efisien dan terjadi peningkatan, misalnya pada artikel P2 yang menjelaskan peningkatan tersebut terjadi karena berkurangnya pendapatan daerah yang diterima dan juga karena ada penurunan jumlah nominal belanja yang tergolong cukup stabil.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu kinerja keuangan dari beberapa penelitian yang telah dianalisis jika diukur menggunakan rasio kemandirian dan rasio efisiensi, mayoritas penelitian menyatakan pemerintah daerah di Indonesia mengalami penurunan yang disebabkan kegiatan-kegiatan dibatasi karena adanya pandemi walaupun ada pula yang mengalami peningkatan karena fokus pemerintah. Tetapi jika dinilai dengan menggunakan rasio efektivitas, mayoritas penelitian menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami peningkatan atau efektif karena dilakukan penyesuaian PAD, dan adapun yang menurun karena retribusi pajak.

Keterbatasan penelitian ini yaitu kurangnya pembahasan mengenai penjelasan dari rasio kinerja keuangan yang digunakan dan hasil dari rasio selain tiga rasio yang paling umum digunakan dalam penelitian. Dan menyarankan untuk riset selanjutnya dapat menjelaskan lebih detail mengenai rasio untuk menilai kinerja keuangan yang digunakan oleh pemerintah daerah.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Allah SWT. yang telah memberikan saya kesehatan dan kewarasan untuk menyelesaikan artikel ini, kepada orang tua saya yang sebagai motivasi saya, serta diri saya sendiri karena sudah melawan rasa malas yang tidak ada hentinya, terima kasih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Musdalifah, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DI MASA PANDEMI COVID-19," Makassar, Aug. 2022.
- [2] A. K. Habibi, S. Imtikhanah, and R. Hidayah, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-PROVINSI JAWA TENGAH SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID19," *Jurnal Neraca*, pp. 122–147, 2021, [Online]. Available: <https://jatengdaily.com>.
- [3] A. Onibala, T. O. Rotinsulu, I. Pingkan, and F. Rorong, "DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA," 2021.
- [4] B. Q. Syahara and M. Aufa, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19," *JCAA: Journal of Culture Accounting and Auditing*, vol. 1, pp. 27–38, 2022, [Online]. Available: <http://journal.umg.ac.id/index.php/>
- [5] F. Rahmawati and E. Kiswara, "DAMPAK COVID-19 TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH (Studi Kasus Pada 34 Pemerintah Provinsi di Indonesia)," *DIPONEGORO JOURNAL OF ACCOUNTING*, vol. 11, no. 2, pp. 1–8, 2022, [Online]. Available: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- [6] W. D. Puspita and D. A. Pangastuti, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMKOT BATU SEBELUM DAN SAAT PANDEMI COVID-19," *Among Makarti*, vol. 15, no. 1, pp. 90–104, 2022.
- [7] R. C. Tiarso, "ANALISIS LAPORAN KEUANGAN BALAI DESA KEMANGGUNGAN DUKUH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN DI MASA PANDEMI COVID-19," Tegal, Jul. 2021.

- [8] M. I. Amal and P. Wibowo, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA SEBELUM DAN SESUDAH PANDEMI COVID-19," *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, pp. 83–93, 2022.
- [9] S. Soraida, "ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJARMASIN SEBELUM DAN SELAMA PANDEMI," *JEKMA; Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, vol. 1, no. 2, pp. 78–82, 2022.
- [10] D. Vebiani and R. Dian Hardiana, "Analisis Kinerja Keuangan Daerah Sebelum dan Pada Saat Pandemi COVID-19 (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Barat)," 2022.
- [11] S. Chaled, & S. Sarumpaet. Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 Pada Organisasi Nirlaba di Bandar Lampung. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, XXIV(1), 1-16. 2019
- [12] Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi. 2018
- [13] M. N. H., Alvianto, N. P., Adam, I. A., Sodik, E., Sedyono, & A. P. Widodo, Dampak Dan Faktor Kesuksesan Penerapan Enterprise Resource Planning Terhadap Kinerja Organisasi: Systematic Literature Review. *Jurnal Nasiona Teknologi Dan Sistem Informasi*, 7(3), 172–180. 2022, [Online]. Available: <https://doi.org/10.25077/teknosi.v7i3.2021.172-180>